

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga  
melayani  
bangsa



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**2023**

**INSPEKTORAT DAERAH**



Wujudkan **Inspektorat** yang **SIGAP**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3 Sumber Daya Manusia	3
1.4 Maksud dan Tujuan	5
1.5 Isu-isu Strategis	5
1.6 Cascading Kinerja	6
1.7 Peta Proses Bisnis	8
1.8 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH	
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Tujuan dan sasaran	11
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	13
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH	
3.1 Analisis Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023	21
3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 – 2023	28
3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode renstra	33
3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional (Target SPM)	34
3.5 Akuntabilitas keuangan	36
3.6 Pencapaian kinerja dan anggaran	37
3.7 Efisiensi penggunaan sumber daya	39
3.8 Prestasi dan Penghargaan	41
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Rekomendasi	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Dumai
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023
7. Penghargaan

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Saran/Rekomendasi	9
Tabel 2	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	9
Tabel 3	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	13
Tabel 4	Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2023	14
Tabel 5	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Dumai	15
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	16
Tabel 7	Program Kerja Inspektorat Daerah	16
Tabel 8	Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	17
Tabel 9	Perubahan Program Kerja Inspektorat Daerah	17
Tabel 10	Perubahan IKU Inspektorat Daerah Tahun 2023	18
Tabel 11	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 12	Atribut Capaian Indikator Kinerja	21
Tabel 13	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	21
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	28
Tabel 15	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	33
Tabel 16	Indikator dan Target Nasional Sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Penegakan Hukum Nasional yang Mantap Terkait Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota	35
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional	35
Tabel 18	Sasaran Strategis dan Anggaran Program Prioritas Tahun 2023	36
Tabel 19	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	38
Tabel 20	Prestasi dan Penghargaan Inspektorat Daerah Tahun 2023	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Dumai	3
Gambar 2 Jumlah ASN Inspektorat Daerah Menurut Jabatan	4
Gambar 3 Jumlah ASN Inspektorat Daerah Menurut Pendidikan Terakhir	4
Gambar 4 Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai	7
Gambar 5 Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kota Dumai	8
Gambar 6 Misi Kota Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai	11

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. Meskipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin, namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaikinya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang pengawasan. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Inspektorat Daerah. Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Daerah Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, 29 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH,



Drs. Riki Dwi Woro, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730929 199303 1 003

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Inspektorat Daerah Kota Dumai menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Inspektorat Daerah mendukung terwujudnya MISI ke-4 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik”** dan SASARAN ke-11 “Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah”. Untuk mendukung terwujudnya Misi ke-4 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, maka ditetapkan Tujuan Inspektorat Daerah yaitu **“Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah”**.

Secara umum Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Dumai 2021-2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) Sasaran Strategis, dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Namun, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, pada Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Dumai 2021-2026 telah ditetapkan 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) Sasaran Strategis, dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021-2026, adalah dengan ditetapkannya 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - a. Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - c. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
    - d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik;
    - e. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;



- f. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
  - h. Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
  - c. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
  - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - c. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
  - d. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- a. Subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
  - b. Subkegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - c. Subkegiatan Review Laporan Kinerja;
  - d. Subkegiatan Review Laporan Keuangan;

- e. Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK–RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
    - a. Subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
    - b. Subkegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
- III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
    - a. Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; dan
    - b. Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
  - 2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
    - a. Subkegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
    - b. Subkegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
    - c. Subkegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
    - d. Subkegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel I  
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Level Maturitas SPIP	3
		2. Level Kapabilitas APIP	3
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP OPD	A
		2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	95%
		3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	95%
		4. Persentase Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	100%
		5. Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 13.846.485.720,- (*tiga belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) untuk melaksanakan 3 (tiga) Program Kerja antara lain.

Tabel II  
Program Kerja Inspektorat Daerah

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.985.456.265,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.466.283.100,-	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 394.746.355,-	APBD
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 13.846.485.720,-</b>	<b>APBD</b>

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

Seiring dengan Perubahan Anggaran, maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2023.

Tabel III  
Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Level Maturitas SPIP	3
		2. Level Kapabilitas APIP	3
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP OPD	A
		2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	95%
		3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	95%
		4. Persentase Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	100%
		5. Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

Untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagaimana tersaji pada Tabel 3 diatas, Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan perubahan anggaran sebesar Rp. 16.023.276.948,- (*enam belas milyar dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*) untuk melaksanakan 3 (tiga) Program Kerja antara lain:

Tabel IV  
Perubahan Program Kerja Inspektorat Daerah

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.011.311.248,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.983.183.100,-	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.028.782.600,-	APBD
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 16.023.276.948,-</b>	<b>APBD</b>

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

Inspektorat Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel V  
Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Predikat Capaian
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	3	3	100%	sangat berhasil
	<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>	<b>3,2</b>	<b>3,356</b>	<b>105%</b>	<b>sangat berhasil</b>
	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%	sangat berhasil
	<b>Skor Kapabilitas APIP</b>	<b>3,31</b>	<b>3,31</b>	<b>100%</b>	<b>sangat berhasil</b>
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	A	B	80%	berhasil
	<b>Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>72</b>	<b>66,81</b>	<b>93%</b>	<b>sangat berhasil</b>
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	95%	83%	87%	sangat berhasil
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	<b>86%</b>	<b>83%</b>	<b>97%</b>	<b>sangat berhasil</b>
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	95%	85%	89%	sangat berhasil
	<b>(dihapus)</b>	<b>87%</b>	<b>85%</b>	<b>98%</b>	<b>sangat berhasil</b>
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%	0%	0%	tidak berhasil
<b>(dihapus)</b>	-	-	-	-	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori BERHASIL.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 16.023.276.948,- (*enam belas milyar dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*) bersumber dari APBD dan Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 15.670.762.560,- (*lima belas milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 352.514.388,- (*tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*).

1. Belanja Operasi	:	Rp.	15.670.762.560,00
2. Belanja Modal	:	Rp.	352.514.388,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>16.023.276.948,00</b>

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel VI  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
<b>Tujuan:</b> Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah  <b>Sasaran:</b> Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Level Maturitas SPIP;	3	3	100%	16.023.276.948,00	15.160.300.040,85	94,61%
	2. Level Kapabilitas APIP;	3	3	100%			
	3. Nilai SAKIP OPD;	A	B	80%			
	4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI;	95%	83%	87%			
	5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP;	95%	85%	89%			
	6. Persentase WBK dan WBBM;	100%	0%	0%			
	7. Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah.	100%	100%	100%			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota Dumai	100%	100%	100%	13.011.311.248,00	12.439.125.420,85	95,60%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100%	156%	156%	1.983.183.100,00	1.804.362.910,00	90,98%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%	1.028.782.600,00	916.811.710,00	89,12%

Sumber: Inspektorat Daerah, 2023

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel VII

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	KET.
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	100%	94,61%	106%	Sangat Efisien
	Level Kapabilitas APIP	100%	94,61%	106%	Sangat Efisien
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	80%	94,61%	85%	Efisien
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	87%	94,61%	92%	Efisien
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	89%	94,61%	94%	Efisien
	Persentase WBK dan WBBM	0%	94,61%	0%	Kurang Efisien
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%	94,61%	106%	Sangat Efisien

Sumber: Inspektorat Daerah, 2023

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama* Level Maturitas SPIP tingkat efisiensinya adalah 106% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**.



2. Pada *Indikator Kinerja Utama* Level Kapabilitas APIP tingkat efisiensinya adalah 106% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**.
3. Pada *Indikator Kinerja Utama* Nilai SAKIP OPD tingkat efisiensinya adalah 85% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (80%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
4. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI tingkat efisiensinya adalah 92% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (87%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
5. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP tingkat efisiensinya adalah 94% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (89%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
6. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tingkat efisiensinya adalah 0% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (0%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**.
7. Pada *Indikator Kinerja Utama* Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah tingkat efisiensinya adalah 106% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**.



# BAB I



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai; dan
5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah Kota Dumai dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Inspektorat Daerah Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

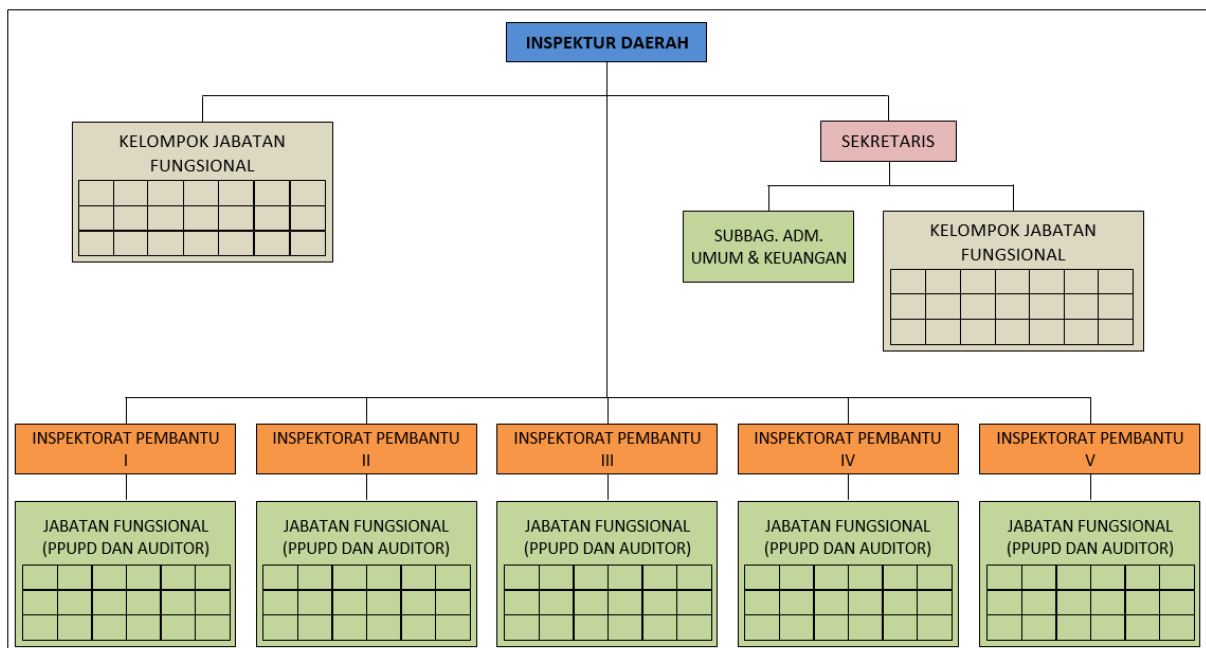
1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali kota;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kota Dumai terdiri dari:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Inspektorat Pembantu I;
4. Inspektorat Pembantu II;
5. Inspektorat Pembantu III;
6. Inspektorat Pembantu IV;
7. Inspektorat Pembantu V; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1  
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Dumai



Sumber: Perwako Nomor 30 tahun 2022

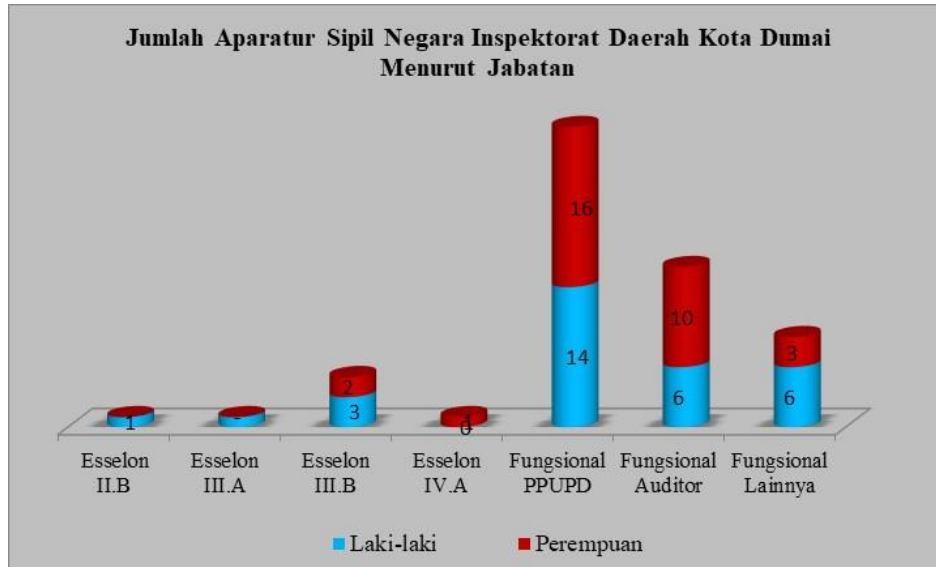
### 1.3 Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang, dimana 49% (31 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 51% (32 orang) berjenis kelamin perempuan. Terdiri dari 8 (delapan) orang pejabat struktural,

46 (empat puluh enam) orang pejabat fungsional tertentu (PPUPD dan Auditor) dan 9 (sembilan) orang pejabat fungsional umum lainnya sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2

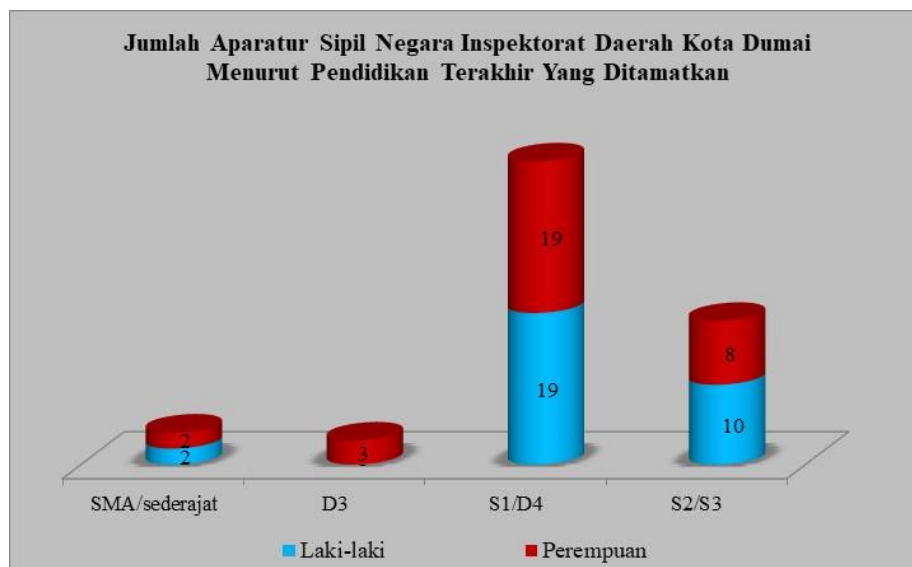
Jumlah ASN Inspektorat Daerah Menurut Jabatan



Berdasarkan Pendidikan terakhir yang ditamatkan, ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi (92%), 56% berjenis kelamin laki-laki dan 44% berjenis kelamin perempuan. Dari pendidikan terakhir yang ditamatkan, lulusan S2/S3 sebanyak 25%, S1/D4 sebanyak 57,7%, D3 sebanyak 9,6%, sedangkan sisanya 7,7% merupakan lulusan SMA/ sederajat sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3

Jumlah ASN Inspektorat Daerah Menurut Pendidikan Terakhir



## 1.4 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja Inspektorat Daerah dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya; dan
4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

## 1.5 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program. Isu strategis terkait dengan urusan pengawasan yang perlu ditangani sbb:

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
2. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta pembangunan zona integritas;
3. Pentingnya penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Perlunya sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Deregulasi kebijakan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
6. Optimalisasi pelayanan pembinaan dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Perlunya penguatan peran APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja;
8. Terjadinya perubahan paradigma pengawasan, yaitu APIP sebagai *strategic partner, quality assurance, and consulting*; dan
9. Ketercukupan sarana dan prasarana penunjang kinerja APIP.

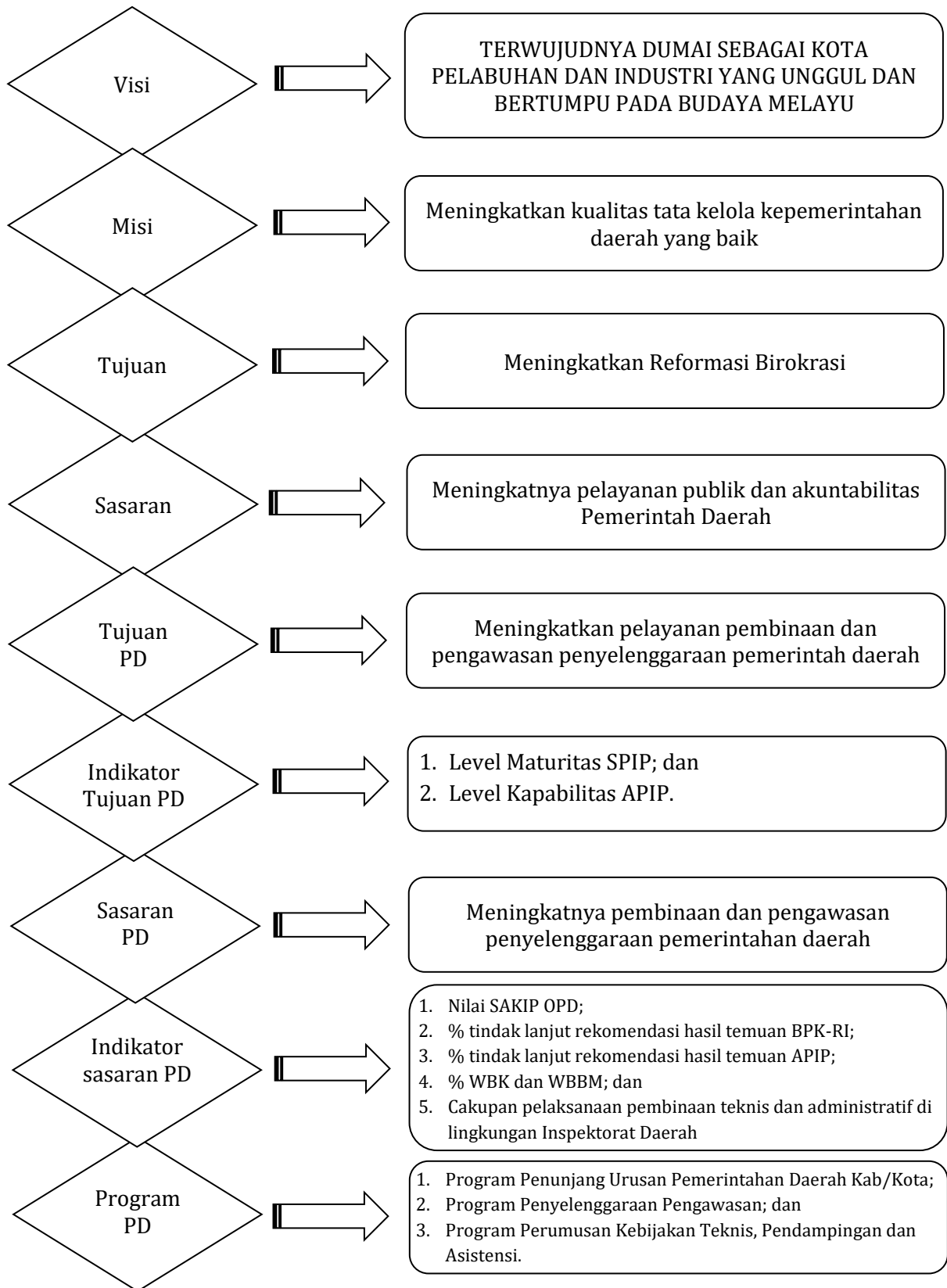
## **1.6 Cascading Kinerja**

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Inspektorat Daerah Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar 4

Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai



## 1.7 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagaimana skema berikut.

Gambar 5

Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kota Dumai

PROSES BISNIS/Tujuan		PROSES BISNIS/Sasaran		SUB PROSES BISNIS /Strategi		Peta Lintas Fungsi / Arah Kebijakan / Kegiatan (pilih "Arah Kebijakan" saja atau "Kegiatan" saja)	
1				2		3	
Kode	PROSES UTAMA	Kode		Kode		Kode	
INSP 01	Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	INSP 01	Mengoptimalkan penyelenggaraan pengawasan	INSP 01.01	Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik	INSP 01.01.01	Penyelenggaraan pengawasan internal urusan pemerintahan daerah
						INSP 01.01.02	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
				INSP 02	Mengoptimalkan pelaksanaan peran pengawasan	INSP 02.01	Penguatan dan deregulasi kebijakan daerah terkait pelaksanaan pengawasan
		INSP 02.02	Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik			INSP 02.02.01	Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi kepada Perangkat Daerah
		INSP 03	Menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	INSP 03.01	Penyediaan sumber daya pendukung pelaksanaan pengawasan	INSP 03.01.01	Penguatan implementasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi berbasis kinerja yang terintegrasi
						INSP 03.01.02	Penguatan peran dan kualitas SDM APIP
						INSP 03.01.03	Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengawasan

Sumber: <https://drive.google.com/file/d/1XVwjE726AkN1g75fFwKz4Xh58urmyW5Z/view?usp=sharing>

## 1.8 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Wali Kota Dumai Nomor 700/1297.1/INSP-S, Tanggal 08 Desember 2023, Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Inspektorat Daerah Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1  
Saran/Rekomendasi

No	Kelemahan/Kekurangan	Saran/Rekomendasi
1.	Laporan kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan belum memberikan informasi terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan lebih cermat dalam menyusun LKjIP khususnya terkait dengan pengungkapan seluruh informasi dan perbandingan capaian kinerja.
2.	Inspektorat Daerah Kota Dumai belum menindaklanjuti semua rekomendasi atas hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi APIP atas hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 2  
Langkah-Langkah Tindak Lanjut

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Menyusun LKjIP sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Bag. Organisasi Sekretariat Daerah	Januari 2024
2.	Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi APIP pada hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	Agustus 2023



# BAB II



**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

**2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2026.

Inspektorat Daerah Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Dumai. Renstra juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”.

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kelabuhan Dan Industri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu;
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas; dan
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 6

Misi Kota Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai



## 2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Inspektorat Daerah Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Inspektorat Daerah Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Inspektorat Daerah Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari sasaran itu akan dituangkan ke dalam strategi dan arah kebijakan. Perumusan sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai. Indikator kinerja tujuan dan sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Seiring dengan dilakukannya perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka dilakukan juga perubahan kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, dimana pada perubahan kedua ini dilakukan penyesuaian terhadap narasi maupun target IKU, serta pendanaan indikatif program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Dumai, serta target IKU yang ditetapkan tahun 2023 pada perubahan kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja**  
**Inspektorat Daerah Tahun 2023**

<b>Visi:</b> Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
<b>Misi ke-4:</b> Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik					
Tujuan	Indikator Tujuan	Targ et	Sasaran	Indikator Sasaran	Targ et
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	3	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	A
	Level Kapabilitas APIP	3		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	95%
				Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	95%
				Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	100%
				Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di Lingkungan Inspektorat Daerah	100%

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026

### 2.3 Kebijakan, Strategi dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program



Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 4  
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2023

<b>Visi:</b> Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
<b>Misi ke-4:</b> Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Peningkatan kapabilitas APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan	Penguatan peran dan kualitas SDM APIP
		2. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja	1. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi; 2. Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi.
		3. Implementasi aksi pencegahan korupsi	Penguatan upaya pencegahan korupsi
		4. Penataan regulasi urusan pengawasan	Penguatan dan deregulasi kebijakan daerah terkait pelaksanaan pengawasan
		5. Transformasi pelayanan	1. Penguatan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan; 2. Penguatan layanan pengaduan masyarakat.

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
3. Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Tujuan, sasaran strategis dan IKU Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut.

Tabel 5  
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
Inspektorat Daerah Kota Dumai

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
	Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Level Maturitas SPIP;</li> <li>2. Level Kapabilitas APIP.</li> </ol>
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP OPD;</li> <li>2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI;</li> <li>3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP;</li> <li>4. Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan</li> <li>5. Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di Lingkungan Inspektorat Daerah.</li> </ol>

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026

#### 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6  
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Level Maturitas SPIP	3
		2. Level Kapabilitas APIP	3
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	3. Nilai SAKIP OPD	A
		4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	95%
		5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	95%
		6. Persentase Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	100%
		7. Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 13.846.485.720,- (*tiga belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) untuk melaksanakan 3 (tiga) Program Kerja antara lain.

Tabel 7  
Program Kerja Inspektorat Daerah

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.985.456.265,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.466.283.100,-	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 394.746.355,-	APBD
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 13.846.485.720,-</b>	<b>APBD</b>

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

Seiring dengan Perubahan Anggaran, maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2023.

Tabel 8  
Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Level Maturitas SPIP	3
		2. Level Kapabilitas APIP	3
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	3. Nilai SAKIP OPD	A
		4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	95%
		5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	95%
		6. Persentase Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	100%
		7. Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

Untuk mendukung tercapainya IKU Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang di dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan perubahan anggaran sebesar Rp. 16.023.276.948,- (*enam belas milyar dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*) untuk melaksanakan 3 (tiga) Program Kerja antara lain.

Tabel 9  
Perubahan Program Kerja Inspektorat Daerah

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.011.311.248,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.983.183.100,-	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.028.782.600,-	APBD
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 16.023.276.948,-</b>	<b>APBD</b>

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

Pada tahun 2023 juga dilakukan Perubahan Kedua Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026. Latar belakang dilakukannya perubahan kedua Renstra ini adalah telah ditetapkannya Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan pada dokumen Perubahan Kedua Renstra ini memiliki kesesuaian dengan Perubahan RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian IKU pada tahun 2022, telah dilakukan penyesuaian terhadap narasi maupun target IKU sebagai berikut:

Tabel 10  
Perubahan IKU Inspektorat Daerah Tahun 2023

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	3
		<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>	<b>3,2</b>
		Level Kapabilitas APIP	3
		<b>Skor Kapabilitas APIP</b>	<b>3,31</b>
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	A
		<b>Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>72</b>
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	95%
			<b>86%</b>
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	95%
			<b>87%</b>
		Persentase Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	100%
		<b>(dihapus)</b>	-
Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%		
	<b>(dihapus)</b>	-	

Sumber: Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026



# BAB III



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Inspektorat Daerah Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 11  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 (dua) rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$capaian = realisasi \times \frac{100\%}{target}$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel berikut.



Tabel 12  
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No.	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	<b>Sangat Berhasil</b>
2.	70% s.d < 85%	tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	<b>Berhasil</b>
3.	55% s.d < 70%	lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	<b>Cukup Berhasil</b>
4.	< 55%	dibawah lima puluh lima persen	<b>Tidak Berhasil</b>

### 3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Inspektorat Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Inspektorat Daerah Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel 11 dan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 13  
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN		2022		2023			
Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	100%	sangat berhasil
	<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>	-	-	<b>3,2</b>	<b>3,356</b>	<b>105%</b>	<b>sangat berhasil</b>
	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	100%	sangat berhasil
	<b>Skor Kapabilitas APIP</b>	-	-	<b>3,31</b>	<b>3,31</b>	<b>100%</b>	<b>sangat berhasil</b>

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	A	BB	A	B	80%	berhasil
	<b>Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah</b>	-	-	<b>72</b>	<b>66,81</b>	<b>93%</b>	<b>sangat berhasil</b>
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	90%	86%	95%	83%	87%	sangat berhasil
				<b>86%</b>	<b>83%</b>	<b>97%</b>	<b>sangat berhasil</b>
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	90%	86%	95%	85%	89%	sangat berhasil
				<b>87%</b>	<b>85%</b>	<b>98%</b>	<b>sangat berhasil</b>
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	90%	0%	100%	0%	0%	tidak berhasil
	<b>(dihapus)</b>	-	-	-	-	-	-
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	sangat berhasil
<b>(dihapus)</b>	-	-	-	-	-	-	

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Level Maturitas SPIP

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Level Maturitas SPIP menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah level 3 realisasi level 3, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu level 3 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 dinyatakan tetap. Berdasarkan dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, IKU ini mengalami perubahan narasi maupun target, yaitu “Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP” dengan target tahun 2023 sebesar 3,2 dan terealisasi sebesar 3,356 atau tercapai 105% (bernilai kinerja sangat tinggi).
- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Level Maturitas SPIP sesuai/melebihi target yang telah ditentukan adalah semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen APIP Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Level Maturitas SPIP adalah Pemerintah Kota Dumai belum memiliki struktur Manajemen Risiko yang berfungsi efektif.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Level Maturitas SPIP adalah optimalisasi peran struktur Manajemen Risiko Pemerintah Kota Dumai.

## 2. Level Kapabilitas APIP

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Level Kapabilitas APIP menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah level 3 realisasi level 3, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar level 3 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 dinyatakan tetap. Berdasarkan dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, IKU ini mengalami perubahan narasi maupun target, yaitu “Skor Kapabilitas APIP” dengan target tahun 2023 sebesar 3,31 dan terealisasi sebesar 3,31 atau tercapai 100% (bernilai kinerja sangat tinggi).
- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Level Kapabilitas APIP sesuai target yang telah ditentukan adalah semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen APIP Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Level Kapabilitas APIP adalah Pengawasan APIP belum sepenuhnya memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Level Kapabilitas APIP adalah optimalisasi peran APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

## 3. Nilai SAKIP OPD

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Nilai SAKIP OPD menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah A realisasi B, tercapai 80% atau bernilai kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar BB atau tercapai sebesar 88%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 8%. Berdasarkan dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, IKU ini mengalami perubahan narasi

maupun target, yaitu “Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah” dengan target tahun 2023 sebesar 72 dan terealisasi sebesar 66,81 atau tercapai 93% (bernilai kinerja sangat tinggi).

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Nilai SAKIP OPD adalah semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dalam mewujudkan tujuan organisasi melalui peningkatan kinerja organisasi.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Nilai SAKIP OPD adalah sebagai berikut:

- Perangkat Daerah tidak serius dalam melaksanakan Penilaian Mandiri implementasi SAKIP di internalnya;
- Kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah sebagian besar belum memenuhi seluruh (100%) kriteria yang dipersyaratkan;
- Sebagian besar IKU OPD belum memiliki defenisi operasional yang jelas, serta pengukurannya belum dijadikan sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment*;
- Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- Sebagian besar OPD belum menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun berkenaan.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Nilai SAKIP OPD adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri implementasi SAKIP internal di seluruh OPD;
- Optimalisasi peran APIP pada tahap pengendalian, evaluasi, serta pemantauan berkelanjutan yang merupakan bagian dari rangkaian proses evaluasi internal implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Kota Dumai.

4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 95% realisasi sebesar 83%, tercapai 87% atau bernilai

kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 86% atau tercapai sebesar 96%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 9%. Berdasarkan dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, IKU ini mengalami perubahan target, yaitu sebesar 86% dan terealisasi sebesar 83% atau tercapai 97% (bernilai kinerja sangat tinggi).

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI adalah semakin meningkatnya kesadaran Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan, serta semakin maksimalnya peran monitoring dan evaluasi tindak lanjut yang dilaksanakan oleh APIP.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah tidak mengetahui bahwa sebenarnya sudah menindaklanjuti temuan karena bukti tindak lanjut tidak disampaikan kepada BPK; dan
- Tim penyelesaian kerugian daerah tidak berjalan efektif.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI; dan
- Optimalisasi peran Tim penyelesaian kerugian daerah.

5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 95% realisasi sebesar 85%, tercapai 89% atau bernilai kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 86% atau tercapai sebesar 96%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 7%. Berdasarkan dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, IKU ini mengalami perubahan target, yaitu sebesar 87% dan terealisasi sebesar 85% atau tercapai 98% (bernilai kinerja sangat tinggi).

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP adalah semakin meningkatnya kesadaran

Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan, serta semakin maksimalnya peran monitoring dan evaluasi tindak lanjut yang dilaksanakan oleh APIP.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP adalah sebagai berikut:

- Sulit menentukan kepada siapa tindak lanjut harus dilakukan karena perubahan SOTK;
- Temuan/rekomendasi yang sama berlanjut ke tahun-tahun berikutnya; dan
- Tim penyelesaian kerugian daerah tidak berjalan efektif.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; dan
- Optimalisasi peran Tim penyelesaian kerugian daerah.

6. Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% realisasi sebesar 0%, tercapai 0% atau bernilai kinerja sangat rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 0% atau tercapai sebesar 0%, maka capaian tahun 2023 tetap tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, IKU ini dihapus karena Penilaian WBK dan WBBM bukan kewenangan daerah. Pemerintah Daerah hanya mengusulkan Perangkat Daerah untuk dilakukan penilaian kelayakan sebagai WBK dan WBBM jika diminta oleh Kementerian PAN dan RB.

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah semakin meningkatnya komitmen Pemerintah Kota Dumai untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.



- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah adalah peningkatan kapasitas APIP dalam memberikan layanan pembinaan dan pengawasan.

### 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 14  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	100%	100%
	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	100%	100%
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	A	A	BB	B	88%	80%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	90%	95%	86%	83%	96%	87%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	90%	95%	86%	85%	96%	89%
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	90%	100%	0%	0%	0%	0%
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Pada tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai. Dari tabel perbandingan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Level Maturitas SPIP.

Penilaian atas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan penjumlahan skor dari ketiga



komponen penilaian, yaitu: (1) penetapan tujuan; (2) struktur dan proses; dan (3) pencapaian tujuan.

Dari Tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Level Maturitas SPIP” Tahun 2023 memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2022 yaitu sebesar 100%, maka dapat dikatakan bahwa capaian di tahun 2023 tetap. Capaian indikator ini di tahun 2022 maupun 2023 sama-sama memenuhi target yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2021-2026. Keberhasilan ini dikarenakan semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen APIP Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

b. Level Kapabilitas APIP.

Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dari Tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Level Kapabilitas APIP” Tahun 2023 memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2022 yaitu sebesar 100%, maka dapat dikatakan bahwa capaian di tahun 2023 tetap. Capaian indikator ini di tahun 2022 maupun 2023 sama-sama memenuhi target yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2021-2026. Keberhasilan ini dikarenakan semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen APIP Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

c. Nilai SAKIP OPD.

Penilaian SAKIP OPD menggunakan kertas kerja yang mempedomani PermenPANRB No. 88 Tahun 2021. Terdapat 4 (empat) komponen penilaian, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; dan (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Nilai hasil akhir dari penjumlahan keempat komponen tersebut memberikan gambaran predikat implementasi SAKIP OPD. Rata-rata Nilai SAKIP OPD dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penjumlahan Nilai akhir implementasi AKIP internal seluruh Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi}}$$

Dari Tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Nilai SAKIP OPD” Tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2022 yaitu sebesar 88%, maka dapat dikatakan bahwa capaian di tahun 2023 lebih rendah daripada capaian di tahun 2022. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja IKU ini sesuai target adalah sebagai berikut:

- Perangkat Daerah tidak serius dalam melaksanakan Penilaian Mandiri implementasi SAKIP di internalnya;
- Kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah sebagian besar belum memenuhi seluruh (100%) kriteria yang dipersyaratkan;
- Sebagian besar IKU OPD belum memiliki defenisi operasional yang jelas, serta pengukurannya belum dijadikan sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment*;
- Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- Sebagian besar OPD belum menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun berkenaan.

Oleh karena itu perlu srategi yang tepat agar di tahun-tahun selanjutnya indikator “Nilai SAKIP OPD“ ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai, diantaranya:

- Optimalisasi pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri implementasi SAKIP internal di seluruh OPD;
- Optimalisasi peran APIP pada tahap pengendalian, evaluasi, serta pemantauan berkelanjutan yang merupakan bagian dari rangkaian proses evaluasi internal implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Kota Dumai.

d. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI.

Dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK – RI yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi BPK – RI}} \times 100\%$$

Dari Tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI” Tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 87%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2022 yaitu sebesar 96%, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja di tahun 2023 turun sebesar 9% dari tahun 2022. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja IKU ini sesuai target adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah tidak mengetahui bahwa sebenarnya sudah menindaklanjuti temuan karena bukti tindak lanjut tidak disampaikan kepada BPK; dan
- Tim penyelesaian kerugian daerah tidak berjalan efektif.

Oleh karena itu perlu strategi yang tepat agar di tahun-tahun selanjutnya indikator “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI” ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai, diantaranya:

- Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI; dan
- Optimalisasi peran Tim penyelesaian kerugian daerah.

e. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP.

Dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi APIP}} \times 100\%$$

Dari Tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP” Tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 89%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2022 yaitu sebesar 96%, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja di tahun 2023 turun sebesar 7% dari tahun 2022. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja IKU ini sesuai target adalah sebagai berikut:

- Sulit menentukan kepada siapa tindak lanjut harus dilakukan karena perubahan SOTK;

- Temuan/rekomendasi yang sama berlanjut ke tahun-tahun berikutnya; dan
- Tim penyelesaian kerugian daerah tidak berjalan efektif.

Oleh karena itu perlu strategi yang tepat agar di tahun-tahun selanjutnya indikator “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP” ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai, diantaranya:

- Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; dan
- Optimalisasi peran Tim penyelesaian kerugian daerah.

- f. Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM}}{\text{Total OPD yang diusulkan}} \times 100\%$$

Dari Tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)” Tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 0%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2022 yaitu sebesar 0%, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja di tahun 2022 dan tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja IKU ini sesuai target adalah Penilaian WBK dan WBBM bukan kewenangan daerah. Pemerintah Daerah hanya mengusulkan Perangkat Daerah untuk dilakukan penilaian kelayakan sebagai WBK dan WBBM jika diminta oleh Kementerian PAN dan RB. Oleh karena itu, di dalam dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, IKU ini dihapus karena kewenangannya tidak pada Pemerintah Daerah.

- g. Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah pembinaan teknis dan administratif yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pembinaan teknis dan administratif yang direncanakan}} \times 100\%$$

Dari Tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah” Tahun 2023 memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2022 yaitu sebesar 100%, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja di tahun 2023 tetap. Meskipun capaian IKU ini di tahun 2023 dan 2022 sesuai dengan target yang ditetapkan, namun berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan IKU ini dihapus dalam dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, karena Indikator ini tidak tepat jika dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama karena levelnya *outcome*.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja tujuan/sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan BERHASIL.

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 15  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	4	3	78%
	Level Kapabilitas APIP	4	3	77%
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	A	B	74%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	95%	83%	87%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	95%	85%	89%
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	100%	0%	0%
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%	100%	100%

Upaya Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyesuaian narasi dan target IKU pada Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, sehingga IKU yang tidak tepat penggunaannya sebagai tolok ukur kinerja organisasi baik secara narasi maupun target perlu dilakukan penyesuaian;
- b. Optimalisasi peran APIP dalam melakukan layanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui peningkatan kapasitas APIP;
- c. Optimalisasi monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP;
- d. Optimalisasi pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri implementasi SAKIP internal di seluruh OPD;
- e. Optimalisasi peran APIP pada tahap pengendalian, evaluasi, serta pemantauan berkelanjutan yang merupakan bagian dari rangkaian proses evaluasi internal implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Kota Dumai;
- f. Optimalisasi peran Tim penyelesaian kerugian daerah; dan
- g. Mendorong Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPIP dan perwujudan Reformasi Birokrasi di Kota Dumai.

#### **3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Inspektorat Daerah Kota Dumai mendukung terwujudnya Misi kedelapan RPJMN Tahun 2020-2024 “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Serta mendukung pelaksanaan agenda pembangunan ketujuh RPJMN Tahun 2020-2024 “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik” melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, dan peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat mendukung terwujudnya sasaran “Penegakan Hukum Nasional yang Mantap” dan “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola” pada Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik. Adapun indikator dan target nasional yang ditetapkan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian Sasaran tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 16**  
**Indikator dan Target Nasional Sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Penegakan Hukum Nasional yang Mantap**  
**Terkait Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota**

Sasaran	Indikator	Target 2024
Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,14
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Indeks RB $\geq$ Baik	85
	Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Skor SAKIP $\geq$ B	80

*Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020*

Dari ketiga indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Dumai yang telah ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Misi ke-4 Kota Dumai melalui pelaksanaan urusan pengawasan. Adapun capaiannya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 17**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional**

Indikator Nasional	Target Nasional 2024	IKU Inspektorat Daerah Kota Dumai	Target 2026	Realisasi tahun 2023
Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,14	Skor Maturitas SPIP → Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,275	SPIP 3,356 dengan IEPK 2,874
Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Skor SAKIP $\geq$ B	80	Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	75	66,81 “B” (89% OPD memiliki nilai SAKIP $\geq$ B)

*Sumber: Inspektorat Daerah, 2023*

### 3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 16.023.276.948,- (*enam belas milyar dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*) bersumber dari APBD. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 15.670.762.560,- (*lima belas milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 352.514.388,- (*tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*).

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 15.160.300.040,85 (*lima belas milyar seratus enam puluh juta tiga ratus ribu empat puluh koma delapan puluh lima rupiah*), terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 14.811.168.822,34 (*empat belas milyar delapan ratus sebelas juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua koma tiga puluh empat rupiah*) dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 349.131.218,51 (*tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan belas koma lima puluh satu rupiah*).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 18  
Sasaran Strategis dan Anggaran Program Prioritas Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	RATA-RATA (%)
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	13.011.311.248,00	12.439.125.420,85	95,60	94,61
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.983.183.100,00	1.804.362.910,00	90,98	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.028.782.600,00	916.811.710,00	89,12	



Total anggaran belanja Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebesar Rp. 16.023.276.948,- (*enam belas milyar dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 15.160.300.040,85 (*lima belas milyar seratus enam puluh juta tiga ratus ribu empat puluh koma delapan puluh lima rupiah*) atau dengan capaian sebesar 94,61% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya:

1. Belum memadainya sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga mempengaruhi jumlah pengawasan yang dilaksanakan;
2. Adanya efisiensi atas penggunaan anggaran; dan
3. Tidak terlaksananya beberapa agenda subkegiatan karena keterbatasan waktu narasumber.

### **3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Pencapaian kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 19  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
<b>Tujuan:</b> Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah  <b>Sasaran:</b> Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Level Maturitas SPIP;	3	3	100%	16.023.276.948,00	15.160.300.040,85	94,61%
	2. Level Kapabilitas APIP;	3	3	100%			
	3. Nilai SAKIP OPD;	A	B	80%			
	4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI;	95%	83%	87%			
	5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP;	95%	85%	89%			
	6. Persentase WBK dan WBBM;	100%	0%	0%			
	7. Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah.	100%	100%	100%			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota Dumai	100%	100%	100%	13.011.311.248,00	12.439.125.420,85	95,60%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100%	156%	156%	1.983.183.100,00	1.804.362.910,00	90,98%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%	1.028.782.600,00	916.811.710,00	89,12%

### 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada Indikator Kinerja Utama Level Maturitas SPIP tingkat efisiensinya adalah 106% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN.
2. Pada *Indikator Kinerja Utama* Level Kapabilitas APIP tingkat efisiensinya adalah 106% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**.
3. Pada *Indikator Kinerja Utama* Nilai SAKIP OPD tingkat efisiensinya adalah 85% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (80%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
4. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI tingkat efisiensinya adalah 92% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (87%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
5. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP tingkat efisiensinya adalah 94% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (89%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
6. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tingkat efisiensinya adalah 0% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (0%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut

menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**.

7. Pada *Indikator Kinerja Utama* Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah tingkat efisiensinya adalah 106% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**.

### 3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Dumai mendapatkan penghargaan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 20  
Prestasi dan Penghargaan Inspektorat Daerah Tahun 2023

No.	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1.	Piagam	Peringkat Terbaik Kesatu Sebagai Kabupaten/Kota yang telah optimal menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan tahun sebelumnya.	Provinsi	Gubernur Riau
				
2.	Piagam	Peringkat Kedua pada Kluster Utama Evaluasi atas Implementasi SAKIP Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023.	Kota	Pemerintah Kota Dumai
				



# BAB IV



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 merupakan gambaran kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2023. Pada dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja utama. Capaian dari masing-masing indikator tersebut pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Level Maturitas SPIP.

Berdasarkan hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Dumai telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP "Level 3". Realisasi capaian level maturitas SPIP Kota Dumai ini sesuai dengan target level maturitas SPIP yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu Level 3. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2023 memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

2. Level Kapabilitas APIP.

Berdasarkan hasil *Quality Assurance* (QA) atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Kota Dumai oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Dumai telah berada pada "Level 3 atau kategori *Delivered*" dengan skor sebesar 3,31. Realisasi capaian level kapabilitas APIP Kota Dumai ini sesuai dengan target level kapabilitas APIP yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu Level 3. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2023 memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

3. Nilai SAKIP OPD.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai tahun anggaran 2023, nilai rata-rata SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebesar 66,81 dengan Predikat B. Realisasi capaian nilai SAKIP OPD ini lebih rendah dari target yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu A. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2023 tidak memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 80%.

4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI.

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2023 adalah sebesar 83%. Realisasi indikator ini di tahun 2023 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu sebesar 95%. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 87%.

5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP.

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP tahun 2023 adalah sebesar 85%. Realisasi indikator ini di tahun 2023 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu sebesar 95%. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2023 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 89%.

6. Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Persentase wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) tahun 2023 adalah sebesar 0%. Sama halnya dengan capaian di tahun 2022, capaian indikator ini di tahun 2023 adalah 0%. Oleh karena itu berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pada dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 IKU ini dihapus karena kewenangannya tidak pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah hanya mengusulkan Perangkat Daerah untuk dilakukan penilaian kelayakan sebagai WBK dan WBBM jika diminta oleh Kementerian PAN dan RB.



7. Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah.

Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi indikator ini di tahun 2023 memenuhi target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu sebesar 100%. Meskipun capaian IKU ini di tahun 2023 sesuai dengan target yang ditetapkan, namun berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan IKU ini dihapus dalam dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, karena Indikator ini tidak tepat jika dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama karena levelnya *outcome*.

#### **4.2. Rekomendasi**

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2023, maka diperlukan beberapa langkah tindak lanjut ke depan untuk mempertahankan kinerja yang telah didapatkan sekaligus meningkatkan kinerja yang belum tercapai sesuai target yang direncanakan, diantaranya:

1. Melakukan penyesuaian narasi dan target IKU pada Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, sehingga IKU yang tidak tepat penggunaannya sebagai tolok ukur kinerja organisasi baik secara narasi maupun target perlu dilakukan penyesuaian;
2. Optimalisasi peran APIP dalam melakukan layanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui pemenuhan kecukupan jumlah APIP, kecukupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun substantif, serta menjamin independensi dan pengembangan karier APIP;
3. Optimalisasi peran APIP dalam melakukan layanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap perangkat daerah dalam meningkatkan ketaatan terhadap peraturan, perbaikan kinerja, perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, serta pengendalian dalam pencapaian tujuan organisasi;
4. Mendorong perangkat daerah dalam rangka optimalisasi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK-RI maupun temuan APIP;

5. Optimalisasi pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri implementasi SAKIP internal di seluruh OPD;
6. Optimalisasi peran APIP pada tahap pengendalian, evaluasi, serta pemantauan berkelanjutan yang merupakan bagian dari rangkaian proses evaluasi internal implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Kota Dumai;
7. Optimalisasi peran Tim penyelesaian kerugian daerah
8. Mendorong Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPIP dan perwujudan Reformasi Birokrasi di Kota Dumai;
9. Melakukan penilaian mandiri secara berkala untuk menjaga dan memelihara Kapabilitas APIP; dan
10. Perlu terus memantapkan komitmen dan integritas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam LKjIP Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023, semoga dapat memberikan gambaran capaian indikator kinerja Utama (IKU) atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam upaya bersama-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, 29 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH,



Drs. Riki Dwi Woro, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730929 199303 1 003



# LAMPIRAN



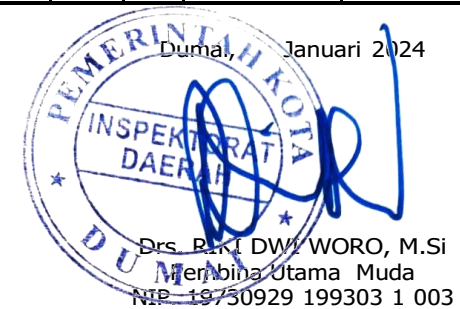
**MATRIK RENCANA STRATEGIS  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2021-2026**

**VISI** : TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU  
**MISI 4** : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola pemerintahan Daerah yang Baik  
**TUJUAN 4.1** : Meningkatkan Reformasi Birokrasi  
**SASARAN 4.1.1** : Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

TUJUAN									SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET.	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Level maturitas penyelenggaraan SPIP ditentukan oleh hasil evaluasi BPKP	Level 3	Level 3	-	-	-	-	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	(Penjumlahan Nilai akhir implementasi AKIP internal seluruh Perangkat Daerah) / (Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi)	B	BB	-	-	-	1. Peningkatan kapabilitas APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan; 2. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; 3. Implementasi aksi pencegahan korupsi; 4. Penataan regulasi urusan pengawasan; dan 5. Transformasi pelayanan.	1. Penguatan peran dan kualitas SDM APIP; 2. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi; 3. Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi; 4. Penguatan upaya pencegahan korupsi; 5. Penguatan dan deregulasi kebijakan daerah terkait pelaksanaan pengawasan; 6. Penguatan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan; dan 7. Penguatan layanan pengaduan masyarakat.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	-	
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang diberikan oleh BPKP merupakan penjumlahan skor dari komponen penilaian Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan	-	-	3,200	3,225	3,250	3,275		Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	(Penjumlahan Nilai akhir implementasi AKIP internal seluruh Perangkat Daerah) / (Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi)	-	-	72	73	74					75
	Level Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP ditentukan oleh hasil evaluasi BPKP berdasarkan skor kapabilitas APIP yang diperoleh	Level 3	Level 3	-	-	-	-		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	(Jumlah rekomendasi BPK-RI yang ditindaklanjuti) / (Total rekomendasi BPK-RI) x 100%	85,1%	86%	86%	86,3%	86,6%					87%
	Skor Kapabilitas APIP	Skor Kapabilitas APIP yang diberikan oleh BPKP merupakan penjumlahan dari skor komponen penilaian Dukungan Pengawasan, Aktivitas Pengawasan, dan Kualitas Pengawasan	-	-	3,31	3,35	3,35	3,36		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	(Jumlah rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti) / (Total rekomendasi APIP) x 100%	83,7%	86%	87%	87,3%	87,6%					88%

INSPEKTUR DAERAH KOTA DUMAI,

Duma, Januari 2024



Drs. Bakti DWI WORO, M.Si  
 Menbina Utama Muda  
 NIP. 19730929 199303 1 003

**RENCANA KINERJA TAHUN 2023**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota Dumai	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.381.100,-
	Level Kapabilitas APIP	3				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	150.381.100,-
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	A				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	10.124.789.752,-
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	95%				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bulan	10.124.789.752,-
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	95%				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	236.021.800,-
	Persentase WBK dan WBBM	100%				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	236.021.800,-
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	35 Orang	266.850.000,-
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 orang	266.850.000,-
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	864.181.368,-
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	14.738.095,-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	119.091.998,-			

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	22.930.000,-
						Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	147.390.855,-
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	90.086.420,-
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	4.988.000,-
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	371.756.000,-
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	93.200.000,-
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan	16 Unit	477.722.388,-
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	125.208.000,-
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	14 unit	166.089.000,-
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	186.425.388,-
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan	2 Laporan	404.227.920,-
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	33.000.000,-
						Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	371.227.920,-

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pengawasan yang Dipelihara	73 Unit	487.136.920,-
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	100.680.000,-
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	182.480.000,-
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 unit	49.690.000,-
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	154.286.920,-
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100%	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	115 Laporan	1.614.183.100,-
						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	5 laporan	81.000.000,-
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	50 laporan	748.200.000,-
						Review Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	57 laporan	348.774.100,-
						Review Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	1 laporan	61.737.800,-

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	2 dokumen	374.471.200,-
						Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	369.000.000,-
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/ daerah yang ditangani	1 laporan	179.080.000,-
						Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	15 laporan	189.920.000,-
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis yang Disusun	2 Rekomendasi	172.252.000,-
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	62.852.000,-
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	109.400.000,-
						Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	15 Perangkat Daerah	856.530.600,-
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 Perangkat Daerah	38.000.000,-
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	182.525.000,-



KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 kegiatan	421.827.800,-
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	2 Perangkat Daerah	214.177.800,-

Dumai, Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,



Drs. RIKI DWI WORO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730929 199303 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. RIKI DWI WORO, M.Si**  
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KOTA DUMAI

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**  
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***  
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023



**Pihak Kedua,**

**H. PAISAL, SKM, MARS**



**Pihak Pertama,**

**Drs. RIKI DWI WORO, M.Si**  
NIP. 19730929 199303 1 003


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

<b>TUJUAN / SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET TAHUN 2022</b>
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3
	Level Kapabilitas APIP	Level	3
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	%	95
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	%	95
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	%	100
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	%	100

<b>No.</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 11.985.456.265,-</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 61.259.100,-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 10.124.789.752,-
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 154.431.800,-
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 191.850.000,-
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 648.529.613,-
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 197.346.000,-
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 274.400.000,-
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 332.850.000,-
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Rp. 1.466.283.100,-</b>
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 1.322.283.100,-
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 144.000.000,-
<b>3.</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Rp. 394.746.355,-</b>

- |  |     |               |
|--|-----|---------------|
| 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | Rp. | 114.052.000,- |
| 3.2 Pendampingan dan Asistensi   | Rp. | 280.694.355,- |

  
**WALIKOTA DUMAI**  
**H. FAISAL, SKM, MARS**

Dumai, Januari 2023  
  
**INSPEKTUR DAERAH**  
**Drs. RIKI DWI WORO, M.Si**  
NIP. 19730929 199303 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. RIKI DWI WORO, M.Si  
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KOTA DUMAI  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS  
Jabatan : WALI KOTA DUMAI  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
PIHAK KEDUA  
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 25 September 2023  
  
PIHAK PERTAMA  
Drs. RIKI DWI WORO, M.Si  
NIP. 19730929 199303 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2023**

<b>TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3
	Level Kapabilitas APIP	Level	3
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	%	95
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	%	95
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	%	100
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	%	100

<b>No.</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.011.311.248,-</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.381.100,-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.124.789.752,
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	236.021.800,
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	266.850.000,
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	864.181.368,
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	477.722.388,
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.227.920,
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.136.920,
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>1.983.183.100,-</b>
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.614.183.100,-
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	369.000.000,
<b>3.</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>1.028.782.600,-</b>
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	172.252.000,
3.2	Pendampingan dan Asistensi	856.530.600,

Dumai, 25 September 2023

  
 Pihak Kedua  
**WALI KOTA DUMAI**  
**H. PAISAL, SKM, MARS**

  
 Pihak Pertama  
**INSPEKTUR DAERAH**  
**Drs. RIKI DWI WORO, M.Si**  
 NIP. 19730929 199303 1 003

## PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

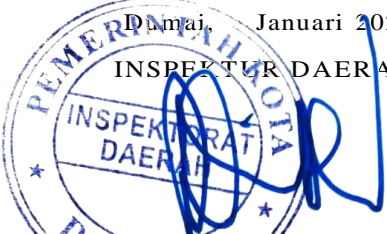
Tahun Anggaran : 2023

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Level maturitas penyelenggaraan SPIP ditentukan oleh hasil evaluasi BPKP	3	3	100%
	Level Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP ditentukan oleh hasil evaluasi BPKP berdasarkan skor kapabilitas APIP yang diperoleh	3	3	100%
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	(Penjumlahan Nilai akhir implementasi AKIP internal seluruh Perangkat Daerah) / (Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi)	A	B	80%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	(Jumlah rekomendasi BPK-RI yang ditindaklanjuti) / (Total rekomendasi BPK-RI) x 100%	95%	83%	87%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	(Jumlah rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti) / (Total rekomendasi APIP) x 100%	95%	85%	89%
	Persentase WBK dan WBBM	(Jumlah OPD yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM) / (Total OPD yang diusulkan) x 100%	100%	0%	0%
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	(Jumlah pembinaan teknis dan administratif yang dilaksanakan) / (Jumlah pembinaan teknis dan administratif yang direncanakan) x 100%	100%	100%	100%

Pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp. 16.023.276.948,00

Realisasi Anggaran Tahun 2023 : Rp. 15.160.300.040,85

Persentase Capaian Program Tahun 2023 : 94,61%

Dumai, Januari 2024  
 INSPEKTUR DAERAH,  
  
 Drs. RIKI DWI WORO, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19730929 199303 1 003

**PAGU ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN  
REALISASI BELANJA TAHUN 2023  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.011.311.248,00</b>	<b>12.439.125.420,85</b>	<b>95,60</b>
I.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.381.100,00	120.713.100,00	80,27
I.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.381.100,00	120.713.100,00	80,27
I.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.124.789.752,00	9.741.071.031,00	96,21
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.124.789.752,00	9.741.071.031,00	96,21
I.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	236.021.800,00	235.550.000,00	99,80
I.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	236.021.800,00	235.550.000,00	99,80
I.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	266.850.000,00	245.948.112,00	92,17
I.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	266.850.000,00	245.948.112,00	92,17
I.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	864.181.368,00	825.490.489,00	95,52
I.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	14.738.095,00	14.736.900,00	99,99
I.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.091.998,00	103.231.250,00	86,68
I.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.930.000,00	17.692.000,00	77,16
I.5.4	Penyediaan Bahan Logistik	147.390.855,00	138.566.721,00	94,01
I.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.086.420,00	84.285.000,00	93,56
I.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.988.000,00	4.988.000,00	100,00
I.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	371.756.000,00	371.566.395,00	99,95
I.5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	93.200.000,00	90.424.223,00	97,02
I.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	477.722.388,00	474.291.218,51	99,28
I.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000,00	125.160.000,00	99,96
I.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166.089.000,00	163.080.000,00	98,19
I.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	186.425.388,00	186.051.218,51	99,80
I.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.227.920,00	359.172.369,00	88,85
I.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	22.530.574,00	68,27
I.7.2	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	371.227.920,00	336.641.795,00	90,68
I.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.136.920,00	436.889.101,34	89,69
I.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.680.000,00	59.830.000,00	59,43



NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
I.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.480.000,00	175.658.000,00	96,26
I.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.690.000,00	47.545.000,00	95,68
I.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.286.920,00	153.856.101,34	99,72
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>1.983.183.100,00</b>	<b>1.804.362.910,00</b>	<b>90,98</b>
II.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.614.183.100,00	1.441.492.130,00	89,30
II.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	81.000.000,00	77.850.000,00	96,11
II.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	748.200.000,00	615.150.000,00	82,22
II.1.3	Review Laporan Kinerja	348.774.100,00	322.931.800,00	92,59
II.1.4	Review Laporan Keuangan	61.737.800,00	59.120.990,00	95,76
II.1.5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP	374.471.200,00	366.439.340,00	97,86
II.2	Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	369.000.000,00	362.870.780,00	98,34
II.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	179.080.000,00	176.561.780,00	98,59
II.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	189.920.000,00	186.309.000,00	98,10
<b>III</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>1.028.782.600,00</b>	<b>916.811.710,00</b>	<b>89,12</b>
III.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	172.252.000,00	171.209.800,00	99,39
III.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	62.852.000,00	62.615.800,00	99,62
III.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	109.400.000,00	108.594.000,00	99,26
III.2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	856.530.600,00	745.601.910,00	87,05
III.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38.000.000,00	30.821.000,00	81,11
III.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	182.525.000,00	161.853.310,00	88,67
III.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	421.827.800,00	367.271.192,00	87,07
III.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	214.177.800,00	185.656.408,00	86,68
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.023.276.948,00</b>	<b>15.160.300.040,85</b>	<b>94,61</b>

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2023  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1.	Piagam	<p>Peringkat Terbaik Kesatu Sebagai Kabupaten/Kota yang telah optimal menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan tahun sebelumnya.</p> 	Provinsi	Gubernur Riau
2.	Piagam	<p>Peringkat Kedua pada Kluster Utama Evaluasi atas Implementasi SAKIP Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023.</p> 	Kota	Pemerintah Kota Dumai